



RENCANA KERJA (RENJA)

**Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Toba**

Tahun 2026

“TOBA MANTAP 2029”
“Maju Daerahnya, Sejahtera
Rakyatnya dan Berkelanjutan
Pembangunannya”



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2026;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 Nomor 12);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3)

19. Peraturan Bupati Toba Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urusan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat daerah adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1(satu) tahun.
9. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah penjabaran kegiatan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II
RUANG LINGKUP RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
- (2) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1(satu) tahun, yaitu Tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III
SISTEMATIKA PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

- (1) Sistematis Renja Perangkat Daerah adalah:
 - Bab I Pendahuluan;
 - Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - Bab V Penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk melaksanakan dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 5

Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

- a. mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah; dan
- b. program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

BAB V
TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan perangkat daerah;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi:
 - a. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - b. verifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang meliputi penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas-Dinas:
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pertanian;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - o. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
 - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - r. Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Badan-Badan:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

6. Kecamatan:

- a. Kecamatan Tampahan;
- b. Kecamatan Balige;
- c. Kecamatan Laguboti;
- d. Kecamatan Sigumpar;
- e. Kecamatan Silaen;
- f. Kecamatan Siantar Narumonda;
- g. Kecamatan Porsea;
- h. Kecamatan Uluan;
- i. Kecamatan Bonatua Lunasi;
- j. Kecamatan Parmaksian;
- k. Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
- l. Kecamatan Lumban Julu;
- m. Kecamatan Ajibata;
- n. Kecamatan Habinsaran;
- o. Kecamatan Borbor;
- p. Kecamatan Nassau;

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 13 Agustus 2025
BUPATI TOBA,

Cap/ dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 13 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUGUS SITORUS
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 27

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA
MERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
o. Kepala Bagian Hukum



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba disusun berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen di Kabupaten Toba dalam mewujudkan Visi dan Misi organisasi yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing komponen organisasi dapat berlangsung dalam proses sinergis, integralistik, holistik, koordinatif, dan melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak yang sama dan sebangun.

Kami menyadari bahwa hasil dari RENJA Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba belum sempurna baik dari penyajiannya maupun cakupan informasi yang diharapkan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan pada penyusunan yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan RENJA Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026. Semoga Penyusunan RENJA Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026 dapat menjadi pondasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah lebih lanjut serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Balige,

2025

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TOBA**

Drs. HENRY M.M. SITOMPUL, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680405 198903 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	21
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	22
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	23
3.3. Program dan Kegiatan	24

BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...	26
4.1. Rencana Kerja.....	26
4.2. Pendanaan Perangkat Daerah.....	28
BAB V. PENUTUP	29

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba sebagai salah satu unsur pembantu penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Toba di bidang pengelolaan pendapatan daerah, wajib menyusun dokumen perencanaan setiap tahunnya yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja) dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toba dan berpedoman kepada dokumen perencanaan lima tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) BAPPENDA Kabupaten Toba. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan ini dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Toba, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Toba, evaluasi pelaksanaan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Toba tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Toba.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai induk dari semua peraturan perundang-undangan perencanaan mengamanatkan bahwa semua unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah wajib menyusun rencana-rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan baik itu dalam jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba sebagai salah satu unsur pembantu penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Toba di bidang pengelolaan pendapatan daerah, wajib menyusun dokumen perencanaan setiap tahunnya yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja) dengan mengacu kepada rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toba dan berpedoman kepada dokumen perencanaan lima tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) BAPPENDA Kabupaten Toba. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan ini dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Toba, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Toba, evaluasi pelaksanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba.

Dengan proses yang sistematis dan substansi materi yang lengkap, Renja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi dengan RKPD Kabupaten Toba dan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba No. 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Toba Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toba Tahun 2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba dan juga bagi Pemerintah Kabupaten Toba dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan daerah untuk Tahun 2026.

1.3.2. TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba adalah untuk mewujudkan keterpaduan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program/kegiatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan pendapatan daerah untuk Tahun 2026, dengan berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah yang didukung dengan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dan berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba untuk Tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penyusunan renja, landasan hukum penyusunan renja, maksud dan tujuan penyusunan renja dan sistematika penulisan dokumen renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan Awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, penelaahan yang menyangkut arah kebijakan prioritas pembangunan nasional dan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Perangkat Daerah, serta penjelasan tentang program/kegiatan dan pagu indikatif.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran, disertai dengan aturan-aturan pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah (kalau sudah tersedia), dan perkiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah tahun berjalan yang baru disahkan.

Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sejak tahun pertama periode Renstra Perangkat Daerah, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2024 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2025. Pada tahun 2024 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba melaksanakan 2 (dua) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang didalam APBD yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 6.287.839.584 dengan realisasi Rp. 5.496.929.945 (87,42%), dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.828.874.720 dengan realisasi sebesar Rp. 1.383.976.163 (75,67%). Total serapan keseluruhan dari pagu sebesar Rp. 8.116.714.304 realisasi penyerapan anggaran selama Tahun 2024 sebesar Rp. 6.880.906.108 atau penyerapannya mencapai (84,77%).

Jumlah Program dan Kegiatan Belanja dengan capaian Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 - yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, 1 kegiatan; dan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7 kegiatan;

Telaahan hasil evaluasi mencakup :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan sub kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan target kinerja 0 Objek Pajak, realisasi kinerja 0 Objek Pajak dengan persentase 100% dan Pagu Anggaran Rp. 231.840.820,- realisasi Rp. 0,- dengan persentase 0 %. Tidak terealisasinya anggaran tersebut karena kegiatan pada penilaian PBBP2 dan BPHTB tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada pelaksanaan pembentukan zona nilai tanah oleh BPN Tahun 2024 dikarenakan BPN berkonsentrasi pada program pembuatan PTSL (Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap) dan program redistribusi tanah.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu

- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan sub kegiatan :
 - Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dengan target kinerja 2 dokumen, realisasi kinerja 2 dokumen persentase 100%
 - Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan target kinerja 3 laporan, realisasi kinerja 3 laporan persentase 100%
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan target kinerja 3 Aplikasi, realisasi kinerja 3 Aplikasi persentase 100%
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dengan target kinerja 4 laporan, realisasi kinerja 4 laporan persentase 100%
 - Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan target kinerja 3 laporan, realisasi kinerja 3 laporan persentase 100%
 - Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan target kinerja 10 dokumen, realisasi kinerja 10 dokumen persentase 100%.

- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan target kinerja 12 laporan, realisasi kinerja 12 laporan persentase 100%.
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba program/kegiatan Tahun 2024 tidak ada yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Adapun penyebab tidak terpenuhinya pencapaian target Perangkat Daerah, antara lain karena :

- a. Terlambatnya pengesahan anggaran;
- b. Realisasi alokasi anggaran lebih kecil dari APBD yang ditetapkan;
- c. Tidak tersedianya rekanan yang sesuai dengan kebutuhan;
- d. Kenaikan indeks harga satuan barang;
- e. Adanya kejadian luar biaya (misal, bencana alam dan bencana non alam);

Penyebab faktor tersebut diatas menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang direncanakan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat daerah;
Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan, dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan sehingga implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra adalah lambatnya pencapaian target seperti yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Jika target capaian program tahunan tidak dapat terpenuhi, maka target capaian program Renstra tidak akan tercapai.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, antara lain : a. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait Program dan Kegiatan. b. Melakukan penguatan SDM Bappenda Kabupaten Toba melalui Sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak secara berkelanjutan c. Melakukan koordinasi terkait penagihan pajak daerah kepada instansi terkait d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai perencanaan dan penganggaran APBD agar adanya penyesuaian anggaran dengan prioritas pembangunan Kepala Daerah. e. Mengoptimalkan pelaksanaan program/ kegiatan dengan membuat jadwal pelaksanaan program/kegiatan yang disesuaikan dengan pengesahan APBD.

Review capaian prioritas dan target program Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program.
2. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
3. Rumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program Renstra Perangkat Daerah dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

4. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya program apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

5. Sajikan dalam bentuk matrik analisis

Rencana Kerja BAPPENDA Kabupaten Toba adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis BAPPENDA Kabupaten Toba. Tercapainya atau tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja (LK) Pemerintah. Renja BAPPENDA Kabupaten Toba ini belum dapat menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BAPPENDA selama tahun 2021 dan hanya dapat menyajikan target tahun 2022 disebabkan karena sehubungan dengan ditetapkannya Perda Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba, sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba terpisah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Oleh sebab itu Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah terlampir pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 pada (Tabel T-C.29) terlampir.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Toba

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan sesuai (Renstra Perangkat Daerah) pada Akhir Periode Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinejra Program dan Kegiatan Tahun 2024								Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)*100		9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)*100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	119	3.640.000.000	106,41	1.276.096.058	114,78	1.828.874.720	89,85	1.383.976.163	78,28	75,67	116,88	2.140.000.000	313,14	4.800.072.221	263,19	131,87
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan dan penerimaan pendapatan daerah terealisasi	100	3.640.000.000	151,51	1.276.096.058	100	1.828.874.720	72,22	1.383.976.163	72,22	75,67	100	2.140.000.000	323,73	4.800.072.221	323,73	131,87
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	100	9.535.000.000	55,78	4.621.456.225	100	6.287.839.584	87,34	5.496.929.945	87,34	87,42	100	6.986.067.000	243,12	17.081.931.170	243,12	179,15
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	230.000.000	58,34	37.380.800	100	93.696.547	100,00	93.684.912	100,00	99,99	100	75.000.000	258,34	206.065.712	258,34	89,59
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100	4.700.000.000	62,50	3.560.378.172	100	4.531.867.300	100,00	4.217.580.549	100,00	93,06	100	5.394.067.000	262,50	13.172.025.721	262,50	280,26
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	100	561.000.000	0,00	-	100	56.000.000	100,00	50.000.000,00	100,00	89,29	100	100.000.000	200,00	150.000.000	200,00	26,74
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100	1.414.000.000	72,71	457.380.968	100	569.437.097	100,00	492.244.795,00	100,00	86,44	100	560.000.000	272,71	1.509.625.763	272,71	106,76
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	100	1.150.000.000	100,00	55.016.000	100	285.199.194	71,11	190.608.000,00	71,11	66,83	100	140.000.000	271,11	385.624.000	271,11	33,53
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100	580.000.000	50,00	331.868.720	100	350.040.000	62,50	230.420.000	62,50	65,83	100	350.000.000	212,50	912.288.720	212,50	157,29
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Terpelihara	100	900.000.000	25,64	156.909.565	100	401.599.446	77,78	222.391.689	77,78	55,38	100	367.000.000	203,42	746.301.254	203,42	82,92
J U M L A H				13.175.000.000	-	5.897.552.283		8.116.714.304		6.880.906.108	165,62	163,10		9.126.067.000		21.882.003.391		

Capaian kinerja dan anggaran pada kegiatan Pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Bappenda TA. 2024 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah target kinerja 114,78% realisasi 89,85%, kinerja tersebut tidak tercapai dikarenakan rendahnya realisasi PAD Tahun 2024 di Kabupaten Toba dengan 1 kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan target kinerja 100% dengan realisasi 72,22%.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% realisasi 87,34%, dengan 6 Kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100% realisasi 100%.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 100% realisasi 100%.
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 100% realisasi 100%.
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100% realisasi 100%.
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% realisasi 71,11%.
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% realisasi 62,50%.
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% realisasi 77,78%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Toba dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir, dimana terbentuk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang menangani Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba yaitu :

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- d. perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- f. penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- g. pengelolaan data dan informasi di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- i. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- j. pengelolaan prasarana dan sarana Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- k. pengembangan tenaga pendidik dan tenaga Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- l. pengelolaan kepegawaian Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- m. pengelolaan keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- n. pengelolaan ketatausahaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- o. pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi.

Perangkat Daerah sesuai dengan tugas fungsi dan pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan, maka Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba meliputi berbagai Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang saling mendukung, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir, dengan peraturan daerah ini dibentuk perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba yang akan dituangkan kedalam Peraturan Bupati Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pajak Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
 - b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah
4. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
 - b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB
5. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pendapatan Lainnya, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan
 - b. Sub Bidang Evaluasi Pelaporan dan Pendapatan Lainnya

Analisis Kinerja Pelayanan Renja Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dituangkan pada tabel pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah BAPPENDA Kabupaten Toba. (Terlampir pada Tabel T-C.30)

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Toba

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)
I	Indikator Kinerja Utama (IKU)													
1	Pajak daerah dan retribusi daerah serta bagi hasil pajak provinsi			100%	100%	7,97	100%	100%	88,03%	84,89%	7,78	100%	100%	
II	Indikator Kinerja Sasaran (IKS)													
1	Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah			5,23%	5,61%	6,01	6,44%	6,24%	4,96%	6,16%	4,27	6,44%	6,44%	
2	Realisasi bagi hasil pajak provinsi			2,76%	2,85%	5,31	3,15%	0,43%	1,39%	5,46%	6,95	3,01%	3,15%	
3	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100	100%	100%	
III	Indikator Kinerja Program (IKP)													
1	Deviasi realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD			110,58%	112,68%	114,78%	116,88%	118,98%	54,76%	100,23%	89,85	116,88%	116,88%	
2	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	46,64%	100,00%	87,34	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, serta pengelolaan dana bagi hasil pajak provinsi. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba melayani berbagai kelompok sasaran yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanannya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba menghadapi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan instansi ini berfungsi kurang maksimal. Permasalahan-permasalahan tersebut berasal dari dalam instansi itu sendiri dan juga dari masyarakat Kabupaten Toba. Secara garis besar permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemetaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak;
3. Terbatasnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Pengelolaan PAD;
4. Kualitas Pelayanan dan SDM yang Belum Mendukung Transformasi Pengelolaan PAD;
5. Minimnya Inovasi dalam Meningkatkan Sumber-Sumber PAD Baru;
6. Ketergantungan Terhadap Transfer Pusat dan Ketidakseimbangan Fiskal;
7. Belum Terbangunnya Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan PAD yang Efektif.

Dampak dari kendala tersebut dapat menghambat/mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat melalui program-program strategis yang telah tertuang dalam visi kepala daerah yakni ***“TOBA MANTAP 2029”, “MAJU DAERAHNYA, SEJAHTERA RAKYATNYA DAN BERKELANJUTAN PEMBANGUNANNYA”***, dan mempunyai Misi ada 6 yaitu :

- Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berakhlak
- Misi 2 : Membangun Infrastruktur Yang Terintegrasi, berkualitas dan Merata

- Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan berbasis Potensi Daerah dan Mendukung Kemandirian Daerah
- Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih sebagai Pelayan (Parhobas) Rakyat
- Misi 5 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban
- Misi 6 : Melestarikan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Toba dalam hal ini mendukung pencapaian *Misi ke-3 Pemerintah Kabupaten Toba*, yaitu *meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi daerah dan mendukung kemandirian daerah*, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Toba menempatkan diri sebagai garda terdepan dalam memperkuat struktur fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian fiskal menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang tidak bergantung pada dana transfer pusat, tetapi bersumber dari kekuatan ekonomi lokal yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis pada potensi unggulan daerah, Bappenda Kabupaten Toba memegang peran strategis sebagai penggerak utama dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Melalui penguatan tata kelola pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis data, Bappenda turut serta mendukung kemandirian fiskal Kabupaten Toba agar tidak semata-mata bergantung pada transfer pusat. Sebagai bagian dari pelaksanaan misi ini, Bappenda Kabupaten Toba fokus pada penggalan potensi-potensi lokal yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan, seperti sektor pariwisata, pertanian, perikanan, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pendekatan yang dilakukan mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, penyempurnaan sistem pemungutan retribusi daerah, serta digitalisasi layanan perpajakan daerah guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan wajib pajak.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan publik yang lebih baik dari waktu ke waktu, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba yang memiliki fungsi pelayanan publik harus meningkatkan kualitas agar mampu mengikuti perkembangan dan memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu untuk meningkatkan kapasitasnya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba menganalisa

faktor-faktor pendukung dan penghambat yang selama ini dirasakan baik itu yang berasal dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba itu sendiri maupun dari luar Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba demi terlaksananya tugas dan fungsi dengan baik.

1. Kekuatan (Strenght)

- a. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung keberadaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Kabupaten Toba
- b. Terpenuhinya pejabat-pejabat struktural sesuai dengan struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba.
- c. Kesadaran aparatur pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba untuk meningkatkan kompetensinya di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Jumlah staf yang kurang memenuhi kebutuhan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba;
- b. Masih perlunya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

3. Peluang (Oportunity)

- a. Tersedianya dana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba.
- b. Berkembangnya investasi dan kunjungan wisata ke Kabupaten Toba memungkinkan peningkatan PAD di Kabupaten Toba.

4. Tantangan (Threats)

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak;
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan pajak
- c. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dan mendorong partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak.

Oleh karena itu, formulasi isu-isu penting yang diperlukan dalam langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di Tahun 2026, antara lain :

1. Perencanaan yang lebih baik dan memenuhi substansi perencanaan sehingga program/kegiatan bisa terlaksana dengan baik;
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur untuk mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tupoksi masing-masing;
3. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dapat terpenuhi secara ideal sehingga percepatan penyelesaian pekerjaan bisa terpenuhi;
4. Potensi-potensi pendapatan asli daerah dapat tergali secara optimal;
5. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah semakin meningkat sehingga pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari pajak daerah bisa meningkat

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah dalam rancangan awal RKPD Tahun 2026, di dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 telah ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama periode perencanaan yang merupakan penerjemahan dari visi dan misi daerah. Adapun tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba pada tujuan dan sasaran RPJMD yaitu tujuan ***“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)”*** secara optimal, transparan dan berkelanjutan guna mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan daerah, sasaran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba yaitu ***“Meningkatnya Pajak Daerah dengan Indikator Kinerja : Rasio Pajak Daerah terhadap PAD, dan Meningkatkan Retribusi Daerah dengan Indikator Kinerja : Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD”***. Sasaran-sasaran Renstra ini menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan Bappenda Kabupaten Toba dalam lima tahun mendatang. Keseluruhan sasaran dirancang untuk mendukung peningkatan PAD secara signifikan melalui penguatan kebijakan fiskal daerah, inovasi pemungutan pendapatan, serta pengelolaan pendapatan yang transparan dan akuntabel. Dengan sasaran yang terukur dan realistis ini, diharapkan Bappenda dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toba.

Program dan kegiatan yang mendukung sepenuhnya pencapaian standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan, sehingga perlu adanya tinjauan ulang standar tersebut dengan kondisi dan kemampuan penganggaran di daerah yang dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut :

TABEL TC-31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Toba

OPD : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	KEUANGAN					KEUANGAN					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Toba	Nilai Evaluasi Internal AKIP	100%	5.436.692.679,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Toba	Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	5.436.692.679,00	
I.1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kab. Toba	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	71.000.000,00	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kab. Toba	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	71.000.000,00	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	35.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	35.000.000,00	
02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Toba	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	36.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Toba	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	36.000.000,00	
I.2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Kab. Toba	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100%	4.815.938.000,00	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Kab. Toba	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100%	4.815.938.000,00	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Toba	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang / Bulan	4.815.938.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Toba	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang / Bulan	4.815.938.000	
I.3	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Kab. Toba	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%	160.375.279,00	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Kab. Toba	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%	160.375.279,00	
01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Toba	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	7.498.050	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Toba	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	7.498.050	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Toba	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor disediakan	4 paket	16.200.000	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Toba	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor disediakan	4 paket	16.200.000	
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Toba	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	9.967.750	Peralatan Rumah Tangga	Kab. Toba	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	9.967.750	
04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Toba	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	22.709.479	Cetakan dan Penggandaan	Kab. Toba	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	22.709.479	
05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	4.000.000	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	4.000.000	
06	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Toba	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	100.000.000	Rapat koordinasi dan Konsultasi	Kab. Toba	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	100.000.000	
I.4	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Toba	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	100%	42.587.400	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Toba	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	100%	42.587.400	
01	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Kab. Toba	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	30.000.000	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Kab. Toba	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	30.000.000	
02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Toba	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	12.587.400	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Toba	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	12.587.400	
I.5	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Toba	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100%	85.080.000,00	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Toba	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100%	85.080.000,00	
03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Toba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	85.080.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Toba	Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	85.080.000	
I.6	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Toba	Barang Milik Daerah Terpelihara	100%	261.712.000,00	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Toba	Barang Milik Daerah Terpelihara	100%	261.712.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Toba	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	224.012.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Toba	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	224.012.000	
02	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Kab. Toba	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	9.500.000	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Kab. Toba	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	9.500.000	
03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Toba	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Toba	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000	
04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Toba	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.200.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Toba	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.200.000	
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Toba	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	8,00%	582.257.321,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Toba	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	8,00%	582.257.321,00	
II.1	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Toba	Pengelolaan dan penerimaan pendapatan daerah terealisasi	100%	582.257.321,00	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Toba	Pengelolaan dan penerimaan pendapatan daerah terealisasi	100%	582.257.321,00	
01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	34.593.269	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Toba	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	34.593.269	
02	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Toba	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	54.081.070	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Toba	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	54.081.070	
03	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Kab. Toba	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	82.794.537	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Kab. Toba	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	82.794.537	
04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Toba	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	60.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Toba	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	60.000.000	
05	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Toba	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	136.700.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Toba	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	136.700.000	
06	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Toba	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	105000 Objek Pajak	15.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Toba	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	105000 Objek Pajak	15.000.000	
07	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Toba	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	12 dokumen	28.858.445	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Toba	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	12 dokumen	28.858.445	
08	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Toba	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	120.230.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Toba	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	120.230.000	
09	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Toba	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	50.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Toba	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	50.000.000	
	J U M L A H				6.018.950.000,00					6.018.950.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat maupun dari LSM, asosiasi-asosiasi, Perguruan tinggi, ataupun dari Perangkat Daerah yang ditujukan langsung kepada BAPPENDA dan dari hasil pelaksanaan musrenbang kabupaten tidak ada atau masih NIHIL.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Toba

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	N	I	H	I	L

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya RPJMN 2025-2045 mengusung beberapa misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2045. Prioritas Nasional merupakan goals periode jangka menengah tahun 2025-2029. Misi Presiden yang disebut sebagai Asta Cita dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Misi/Program Prioritas, Sasaran Utama Pembangunan Nasional dan Proyek Prioritas dalam RPJMN 2025-2029 diatas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba mendukung kebijakan nasional ke-6 membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi Perangkat Daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran memiliki indikator yang dapat menggambarkan ketercapaian visi dan misi pada skala dampak/impact.

3.2.1. Tujuan

Tujuan yang merupakan implementasi atau penjabaran dari misi merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba mendukung pencapaian misi ketiga yaitu “Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, berbasis potensi daerah dan mendukung kemandirian daerah” sehingga menetapkan tujuan yaitu “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis.

Adapun sasaran strategis yang tertuang dalam rencana strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Meningkatnya Pajak Daerah;
2. Meningkatnya Retribusi Daerah.

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	9,97%
		Meningkatnya Pajak Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	63,70%
		Meningkatnya Retribusi Daerah	Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD	24,90%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba, maka perlu dilakukan distribusi indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing kepada seluruh pegawai pada lingkup Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba melalui penjabaran program dan kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun dari tahun 2025-2029 sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Toba. Untuk pedoman penganggaran sejak tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Toba telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan perangkat daerah menurut rancangan RKPD. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba pada Tahun 2026 merencanakan 2 program dan 8 kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.436.692.679,- dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 582.257.321,- dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Secara garis besar, uraian mengenai rencana program dan kegiatan tahun 2026 sesuai Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba dapat dilihat pada Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Tabel T-C.33 berikut :

TABEL TC-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Toba

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Kab. Toba	100%	5.436.692.679,00	APBD	-	100%	5.606.328.679,00
5.02	01	2	01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Toba	100%	71.000.000,00	APBD	-	100%	77.500.000,00
5.02	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Toba	5 Dokumen	35.000.000,00	APBD	-	5 Dokumen	38.300.000,00
5.02	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Toba	12 Laporan	36.000.000,00	APBD	-	12 Laporan	39.200.000,00
5.02	01	2	02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Kab. Toba	100%	4.815.938.000,00	APBD	-	100%	4.937.934.000,00
5.02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Toba	28 Orang / Bulan	4.815.938.000	APBD	-	30 Orang/ Bulan	4.937.934.000
5.02	01	2	06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Kab. Toba	100%	160.375.279,00	APBD	-	100%	180.075.279,00
5.02	01	2	06	01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Toba	4 paket	7.498.050	APBD	-	4 paket	10.698.050
5.02	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor disediakan	Kab. Toba	4 paket	16.200.000	APBD	-	4 paket	19.900.000
5.02	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Toba	4 paket	9.967.750	APBD	-	4 paket	13.167.750
5.02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Toba	4 paket	22.709.479	APBD	-	4 paket	25.909.479
5.02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Toba	4 dokumen	4.000.000	APBD	-	4 Dokumen	7.200.000
5.02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Toba	2 laporan	100.000.000	APBD	-	2 Laporan	103.200.000
5.02	01	2	07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	Kab. Toba	100%	42.587.400,00	APBD	-	100%	48.987.400,00
5.02	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Toba	2 unit	30.000.000	APBD	-	2 Unit	33.200.000,00
5.02	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Toba	1 unit	12.587.400	APBD	-	1 Unit	15.787.400,00
5.02	01	2	08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	Kab. Toba	100%	85.080.000,00	APBD	-	100%	88.280.000,00
5.02	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Toba	4 Laporan	85.080.000	APBD	-	4 Laporan	88.280.000,00
5.02	01	2	09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Barang Milik Daerah Terpelihara	Kab. Toba	100%	261.712.000,00	APBD	-	100%	273.552.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Toba	16 Unit	224.012.000	APBD	-	16 Unit	226.252.000,00
5.02	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Toba	10 Unit	9.500.000	APBD	-	10 Unit	12.700.000,00
5.02	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Toba	1 Unit	25.000.000	APBD	-	1 unit	28.200.000,00
5.02	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Toba	1 Unit	3.200.000	APBD	-	1 Unit	6.400.000,00
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Kab. Toba	8,00%	582.257.321,00	APBD	-	7,90%	607.857.321,00
5.02	04	2	01		KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan dan penerimaan pendapatan daerah terealisasi	Kab. Toba	100%	582.257.321,00	APBD	-	100%	607.857.321,00
5.02	04	2	01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Toba	2 Dokumen	34.593.269	APBD	-	2 Dokumen	37.793.269
5.02	04	2	01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Toba	3 Laporan	54.081.070	APBD	-	3 Laporan	57.281.070
5.02	04	2	01	04	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Toba	2 Unit	82.794.537	APBD	-	2 Unit	85.994.537
5.02	04	2	01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Toba	12 Laporan	60.000.000	APBD	-	12 Laporan	63.200.000
5.02	04	2	02	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Toba	12 Laporan	136.700.000	APBD	-	12 Laporan	139.900.000
5.02	04	2	02	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kab. Toba	105000 Objek Pajak	15.000.000	APBD	-	105000 Objek Pajak	18.200.000
5.02	04	2	02	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Kab. Toba	12 dokumen	28.858.445	APBD	-	12 dokumen	32.058.445
5.02	04	2	02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Toba	12 Laporan	120.230.000	APBD	-	12 Laporan	123.430.000
5.02	04	2	02	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Toba	2 Laporan	50.000.000	APBD	-	2 Laporan	50.000.000
J U M L A H									6.018.950.000,00				6.214.186.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba menetapkan sasaran pada Peraturan Bupati Nomor tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yang ingin dicapai/diwujudkan sesuai dengan program kerja/rencana kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba, yaitu:

1. Meningkatnya Pajak Daerah
2. Meningkatnya Retribusi Daerah

Dengan sasaran tersebut dijabarkan menjadi 3 (tiga) indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba, yaitu :

1. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah
2. Rasio Pajak Daerah terhadap PAD
3. Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Toba maka pada Tahun 2026 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melaksanakan 2 Program, 7 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan, termasuk rutin dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

4.1.1. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

4.1.2 Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pengelolaan Pendapatan Daerah

4.1.3 Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya
11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
14. Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
17. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
18. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
19. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
20. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
21. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
22. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
23. Penagihan Pajak Daerah
24. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
25. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

4.2. PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba pada Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba 2025-2029 direncanakan anggaran sebesar **Rp 6.018.950.000,-** (Enam miliar delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD.

Rencana pelaksanaan pendanaan program kerja, kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Perangkat Daerah dilihat pada SIPD 2026.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TOBA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						6.018.950.000,00							6.214.186.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.018.950.000,00							6.214.186.000,00	
	5.02	KEUANGAN						6.018.950.000,00							6.214.186.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.436.692.679,00						-	5.606.328.679,00	
		[Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah]	Nilai Evaluasi Internal AKIP	84	74.25	76.60	78.90	5.436.692.679,00	-	-	-	-	-	-	5.606.328.679,00	-
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	71.000.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	Bappenda	-	77.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	Bappenda		38.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	36.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	Bappenda		39.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.815.938.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	Bappenda	-	4.937.934.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	4.815.938.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	Bappenda		4.937.934.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	160.375.279,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	Bappenda	-	180.075.279,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	7.498.050,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	Bappenda		10.698.050,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	16.200.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	Bappenda		19.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	9.967.750,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	Bappenda		13.167.750,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	22.709.479,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	Bappenda		25.909.479,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	Bappenda		7.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	Bappenda		103.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	42.587.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	Bappenda	-	48.987.400,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	30.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	Bappenda		33.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	12.587.400,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	Bappenda		15.787.400,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	85.080.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	Bappenda	-	88.280.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	85.080.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	Bappenda		88.280.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	261.712.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	Bappenda	-	273.552.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	224.012.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	Bappenda		226.252.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	9.500.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	Bappenda		12.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	582.257.321,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	Wajib Pajak	-	607.857.321,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	34.593.269,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	Wajib Pajak		37.793.269,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				3 Laporan	54.081.070,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	Wajib Pajak		57.281.070,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	82.794.537,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	Wajib Pajak		85.994.537,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Wajib Pajak		63.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	136.700.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	Wajib Pajak		139.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				105000 Obyek Pajak	15.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan 3. Mengem bangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuh an ekonomi, m embangun desa, dan memperkua t peran usaha mikro yang berkelanjut an.	Wajib Pajak		18.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	28.858.445,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	Wajib Pajak		32.058.445,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	120.230.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 3. Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.	Wajib Pajak		123.430.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 4. Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan.	Wajib Pajak		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	JUMLAH							6.018.950.000,00							6.214.186.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rencaa Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026.

Dalam Penyelesaian tahun berjalan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RENJA Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Balige,

2025

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TOBA**





PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

INSPEKTORAT

Jln. Huta Bulu – Mejan, Balige, Sumatera Utara 22312

Telp. (0632) 21393, Faksimile (0632) 21393

Laman www.tobakab.go.id, Pos-el inspektorat@tobakab.go.id

**CATATAN HASIL REVIU
ATAS
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TOBA
TAHUN 2026**

Uraian Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Toba Nomor 700/250/IRDA/ST/VIII/2025 tanggal 05 Agustus 2025 untuk melaksanakan reviu Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. Pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung rancangan akhir Renja PD

- a. Dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reviu rancangan akhir Renja PD telah lengkap.

2. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Renja PD dengan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026

- a. Nama program, kegiatan, pagu dana dan indikator pada rancangan akhir Renja PD telah sesuai dengan nama program, kegiatan, pendanaan dan indikator pada RKPD Tahun 2026.

Catatan reviu:

--

Koreksi/ Perbaikan yang belum/tidak disetujui

--

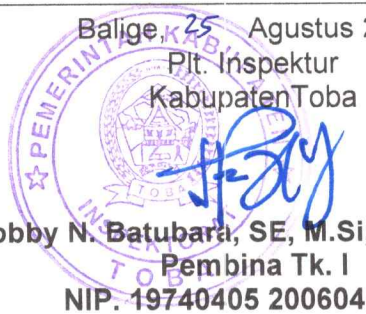
Rekomendasi :

Mempertahankan keselarasan nama program, kegiatan, pagu dana dan indikator pada Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba dengan RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Toba


Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680405 198903 1 003

Balige, 25 Agustus 2025
Plt. Inspektur
Kabupaten Toba


Bobby N. Batubara, SE, M.Si, Ak, CGCAE
Pembina Tk. I
NIP. 19740405 200604 1 004